

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah konflik SPAG Solok dan PT. Tirta Investama menunjukkan adanya pertarungan kepentingan dan kekuasaan, konflik yang terjadi mencerminkan adanya dinamika kekuasaan dan strategi kelompok kepentingan. Konflik berakhir dengan hasil PT. Tirta Investama berhak melakukan PHK terhadap pekerja yang tergabung dalam SPAG Solok. Hasil ini tetap menguntungkan perusahaan karena berhasil menekan pengaruh yang dimiliki serikat kerja dalam ekosistem dunia kerja di PT. Tirta Investama.

Strategi kelompok kepentingan dalam konflik hubungan Industrial yang melibatkan PT. Tirta Investama dengan Pekerja yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Solok Tahun 2022, permasalahan terjadi karena menurut pihak pekerja perusahaan telah mengabaikan hak pekerja dengan cara tidak membayarkan upah lembur mereka dari tahun 2016-2022, hal ini dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan beranggapan bahwa upah jumlah lembur hanyalah 2 jam dan 1 jam dihitung sebagai waktu istirahat, sementara itu pekerja memiliki interpretasi bahwa mereka telah lembur selama 3 jam.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini perusahaan dan pekerja bersama dengan SPAG Solok telah melakukan bipartit namun memang hasil dari upaya tersebut adalah *deadlock* Waktu yang terlalu lama mengakibatkan pekerja bersama dengan SPAG Solok melakukan aksi mogok kerja sebagai ekspresi penolakan atas

hal tersebut menjadi pilihan mereka, bersamaan dengan hal tersebut menurut pihak yang terlibat dalam konflik ini, mereka membutuhkan adanya pihak ketiga yang netral dalam hal ini ialah mediator agar proses mediasi dapat berjalan.

Perusahaan menyampaikan bahwa masalah tentang upah lembur sebenarnya sedang dalam proses pembicaraan dengan perusahaan di pusat, namun aksi mogok kerja ini dinilai perusahaan memperburuk situasi yang ada serta berdampak negatif bagi sektor produksi. Akibat hal tersebut perusahaan harus mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keputusan tersebut menjadi permasalahan baru bagi pekerja dan SPAG Solok sehingga tuntutan mereka bertambah yaitu upah lembur dan bekerja kembali.

Dalam fenomena konflik hubungan industrial yang terjadi antara PT. Tirta Investama dengan Pekerja. Jenis kelompok kepentingan dalam konsep yang dijelaskan oleh Gabriel A. Almond dikutip oleh Mohtar Mas'oeed dan Collin MacAndrews terdapat 4 jenis kelompok kepentingan yaitu kelompok anomik, kelompok non-asosiasional, kelompok institusional dan kelompok asosiasional. Dalam fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu menggolongkan terdapat 2 kelompok kepentingan dalam permasalahan ini yaitu kelompok institusional (PT. Tirta Investama) dan kelompok asosiasional (Pekerja bersama Serikat Pekerja Aqua Grup Solok/SPAG Solok).

Untuk mendeskripsikan hal yang menjadi fokus penelitian, peneliti menggunakan teori strategi kelompok kepentingan oleh G Calvin Mackenzie, dalam teori ini terdapat empat indikator mengenai upaya yang dapat dilakukan

kelompok kepentingan dalam menghadapi konflik hubungan industrial. Indikator pertama dan kedua yaitu lobi dan dukungan politik, strategi ini kelompok pekerja yaitu SPAG Solok dalam menghadapi konflik hubungan Industrial dengan PT. Tirta Investama telah menunjukkan dinamika hubungan antara serikat pekerja, pemerintah dan perusahaan.

SPAG Solok dalam hal ini berhasil mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait, akses kepada Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok. Namun, memang hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Faktor yang mempengaruhi adalah lobi yang juga dilakukan oleh pihak PT. Tirta Investama. Perubahan sikap dari pihak-pihak yang terkait dari yang awalnya memberi dukungan kuat pada pekerja seiring berjalannya waktu cenderung melemah, kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh tekanan karena terlibatnya Kementerian Ketenagakerjaan sehingga terdapat pertimbangan politik. Keterbatasan wewenang pemerintah, strategi perusahaan dan kurangnya persiapan SPAG Solok adalah faktor yang juga mempengaruhi.

Keberhasilan suatu lobi tidak hanya ditentukan oleh intensitas komunikasi dan dukungan politik, hal lainnya yang berpengaruh adalah kekuatan negosiasi juga menjadi strategi yang tepat dan kemampuan untuk membangun sebuah konsensus di antara pihak-pihak yang bertikai. PT Tirta Investama dalam melakukan lobi sebagai perusahaan besar memiliki akses dan pengaruh yang lebih besar terhadap pihak terkait. Indikator selanjutnya adalah dukungan politik, pekerja/SPAG Solok

memperoleh dukungan politik dari pihak terkait dengan upaya memperoleh perhatian melalui demonstrasi dan publisitas di media sosial. Bukan karena menjadi basis politik dari pejabat. PT. Tirta Investama melakukan upaya untuk memperlemah dukungan politik yang diperoleh pekerja/SPAG Solok dengan terlibatnya pihak Kementerian Ketenagakerjaan terlihat jelas bahwa dukungan yang sebelumnya diperoleh SPAG Solok seiring penyelesaian konflik berjalan semakin melemah

Publisitas media, dalam hal ini SPAG Solok telah memanfaatkan dengan cukup efektif, melalui demonstrasi, unggahan media sosial dan penampilan media berita, SPAG Solok berhasil menarik perhatian publik dan pihak terkait. Meski demikian akhir dari konflik masih belum sepenuhnya menguntungkan pihak pekerja. PT Tirta Investama hal ini juga menggunakan publisitas media melalui media berita dengan tujuan melemahkan citra serikat pekerja, memecah solidaritas pekerja dengan memanfaatkan kelemahan pekerja yaitu ekonomi dan menciptakan persepsi bahwa perusahaan telah sejak awal berusaha menyelesaikan masalah. Konflik hubungan industrial sering melibatkan perang opini publik melalui media, kedua belah pihak akan melakukan upaya untuk mendapat kontrol dan membentuk persepsi yang menguntungkan bagi kelompoknya.

Indikator terakhir yaitu proses peradilan oleh pekerja/SPAG Solok dalam hal ini, perjuangan hukum untuk menghadapi PHK massal dan upah lembur yang tidak dibayarkan telah menghadapi berbagai rintangan dan hasil yang tidak sepenuhnya memuaskan bagi pekerja tanggapan SPAG Solok untuk mengajukan gugatan di PHI PN Kota Padang itu berasal dari inisiatif perusahaan yang terlebih dahulu

mengajukan gugatan di PHI PN Jakarta Pusat namun berhasil digagalkan dengan eksepsi kompetensi relatif dari PHI PN Jakarta Pusat itu sendiri sehingga proses peradilan berlangsung di PHI PN Kota Padang.

SPAG Solok bersama pekerja menunjukkan bahwa perjuangan hukum pekerja sering menghadapi berbagai rintangan meski sebagian dikabulkan, Putus Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan sehingga mereka terpaksa *non-job*. Proses peradilan dan administrasi dari pemerintahan yang dinilai berbelit juga menambah faktor negatif dalam hal ini. Di sisi lainnya, strategi proses peradilan oleh PT. Tirta Investama adalah dengan terlebih dahulu mendaftarkan gugatan ke PHI PN Jakarta Pusat tetapi SPAG Solok/pekerja berhasil menggagalkan hal ini melalui pengajuan eksepsi terhadap kompetensi relatif dari PHI PN Jakarta Pusat.

Proses peradilan memang berjalan di PHI PN Kota Padang namun, juga terdapat *winning condition* bagi perusahaan. PT. Tirta Investama tetap dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja. Hal yang mengakibatkan putus hubungan kerja tersebut menjadi *winning condition*. Bagi PT. Tirta Investama/oknum manajemen terdapat rasa tidak suka secara personal terhadap etika beberapa oknum pekerja. Berdasarkan paparan di atas jelas menyoroti pentingnya bagi pekerja untuk memperkuat organisasi dan mencari dukungan yang lebih dari berbagai pihak untuk menghadapi kekuatan politik dan ekonomi perusahaan yang jauh lebih besar.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, strategi kelompok kepentingan yang digunakan oleh kelompok kepentingan dalam hal ini adalah pekerja bersama SPAG Solok dan PT. Tirta Investama telah cukup efektif namun tidak dapatnya mengendalikan hasil akhir serta hasil akhir yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi kedua pihak adalah hal yang tidak dapat dihindari. Beberapa hal yang menjadi saran peneliti secara akademis dan praktis yaitu :

1. Secara Akademis

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti deskripsikan dan merujuk pada penelitian terkait strategi kelompok kepentingan yang digunakan oleh pekerja/SPAG Solok dan PT. Tirta Investama untuk menghadapi konflik hubungan industrial sudah cukup efektif namun hasil akhir dan dinamika konflik menjadi suatu faktor yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Untuk penelitian lebih lanjut dapat melakukan pengembangan model analisis yang lebih komprehensif, melakukan wawancara dan memperoleh izin dari perusahaan serta Dinas terkait jika memungkinkan, melakukan studi komparatif dengan kasus serupa di sektor industri atau wilayah geografis lainnya.

2. Secara Praktis

Dalam konflik hubungan industrial, Serikat Pekerja dapat meningkatkan kapasitas dalam negosiasi dan pengelolaan konflik, mereka dapat membentuk jaringan dengan organisasi serupa guna memperkuat posisi dalam tawar-menawar, meningkatkan koordinasi antar anggota serikat juga dapat meningkatkan daya

mereka. Pemerintah sebagai penegak hukum dan pelayan publik perlu lebih tegas, lebih aktif sebagai mediator. Perlu adanya perbaikan terhadap administratif di proses penyelesaian konflik hubungan industrial dan proses peradilan sehingga tidak memperburuk keadaan pada konflik. Perusahaan dalam hal ini perlu membangun dialog yang lebih konstruktif guna menyelesaikan perbedaan pendapat, perusahaan perlu melakukan revisi terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman di masa mendatang. Media dalam hal ini juga perlu lebih bertanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang lebih objektif dan masyarakat perlu mendapatkan pendidikan media agar dapat kritis dan skeptis terhadap informasi di media.

Peneliti melihat bahwa upaya lain yang dapat dilakukan adalah revisi terhadap Undang – Undang Ketenagakerjaan agar dapat lebih melindungi pekerja, penguatan lembaga penyelesaian sengketa. Kompleksnya konflik hubungan industrial dipengaruhi oleh berbagai faktor, upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan adil.